

BENTURAN KEPENTINGAN – OPD
2022
PERGUB SUMUT NO 1, BD 2022/ NO 1, 16 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan bebas korupsi di jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dipandang perlu pedoman pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pergub No. 38 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 9 Tahun 2021; Pergub No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 15 Tahun 2020; Pergub No. 3 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang pedoman penanganan benturan kepentingan meliputi menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan; menegakkan integritas kinerja Pejabat/Pegawai; mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah; menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2022 dan ditetapkan tanggal 4 Januari 2022.